

# **Profil Perkotaan Indonesia: Transformasi Lingkungan ke Perkotaan Layak Huni (Livable City) Menuju Perkotaan Berkelanjutan**

**Rudy P Tambunan  
Prodi Kajian Pengembangan Perkotaan  
SKSG – Universitas Indonesia**

**Webinar Dies Natalis KPP SKSG UI 2 Juni 2021**



# PENDAHULUAN

- ❖ Kota dan Kawasan Perkotaan merupakan ekosistem manusia yang dibangun di atas ekosistem alam berfungsi sebagai pusat pertumbuhan wilayah.
- ❖ Besaran dan tipe kota dan kawasan perkotaan di Indonesia sangat bervariasi;
- ❖ Pemerintah telah mempersiapkan tahapan rencana pengembangan dan pembangunan kota dan kawasan perkotaan nasional yang harus diintegrasikan ke dalam rencana pembangunan daerah dan rencana tata ruang wilayah;
- ❖ Kota dan kawasan perkotaan di Indonesia dihadapkan pada masalah urbanisasi (proses perubahan kota) fisik, ekonomi dan sosial.
- ❖ Perlu proses transformasi kota agar perkotaan bisa memenuhi standar pelayanan perkotaan sebagai kota layak huni.
- ❖ Stadia kota layak huni menjadi landasan menuju kota hijau dan kota berkelanjutan.

# Lingkup Materi Bahasan

- 1) **Ekosistem Perkotaan dan Manajemen Lingkungan Perkotaan.**
- 2) **Skema Pengembangan Perkotaan Di dalam Dokumen Perencanaan Nasional**
- 3) **Review perkembangan kota/perkotaan di Indonesia dan Skema Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang**
- 4) **Urusan Pemerintahan Di Bidang LH menurut UU no 23 thn 2014 ttg Pemda dan UU 32 thn 2009 ttg PPLH**
- 5) **Pembangunan Perkotaan Di Dalam RPJPN 2005-2025**
- 6) **Visi dan Misi di dalam dokumen kebijakan dan Strategi Pembangunan Perkotaan Nasional.**
- 7) **Transformasi kota layak huni menuju kota berkelanjutan**
- 8) **Penutup**

# **Ekosistem Perkotaan dan Manajemen Lingkungan Perkotaan**



## **Kriteria Besaran Kawasan Perkotaan.**

- 1) Kawasan megapolitan : memiliki 2 (dua) atau lebih kawasan metropolitan yang mempunyai hubungan fungsional dan membentuk sebuah sistem.**
- 2) Kawasan metropolitan :**
  - a. Jumlah penduduk paling sedikit 1.000.000 (satu juta) jiwa;**
  - b. Terdiri atas satu kawasan perkotaan inti dan beberapa kawasan perkotaan di sekitarnya yang membentuk satu kesatuan pusat perkotaan; dan**
  - c. Ada keterkaitan fungsi antarkawasan perkotaan dalam satu sistem metropolitan.**
- (3) Kawasan perkotaan besar : jumlah penduduk lebih dari 500.000 jiwa**
- (4) Kawasan perkotaan sedang: jumlah penduduk lebih dari 100.000 - 500.000 jiwa.**
- (5) Kawasan perkotaan kecil : Jumlah penduduk lebih dari 50.000 sampai dengan 100.000 jiwa.**

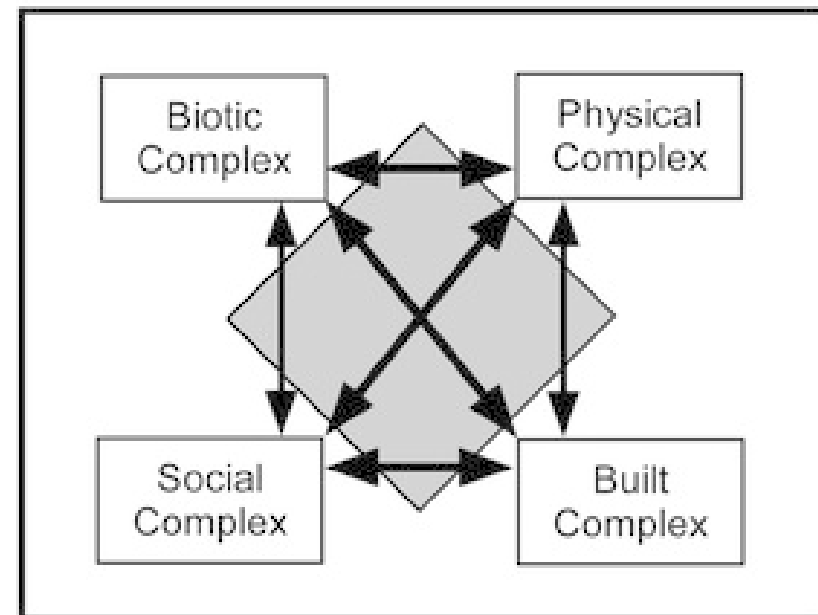


## Ekosistem Perkotaan

- ❑ Kawasan Perkotaan habitat manusia yang dibangun di atas ekosistem alam yang mengalami proses perubahan alami.
- ❑ Berlangsung berbagai interaksi kompleksitas biota; kompleksitas fisik, kompleksitas sosial dan kompleksitas lingkungan terbangun.
- ❑ Interaksi menuntut ko-adaptasi sosiosistem dengan ekosistem harus seimbang.
- ❑ Harus disadari bahwa ekosistem perkotaan ekosistem tidak lengkap; perlu pemeliharaan.

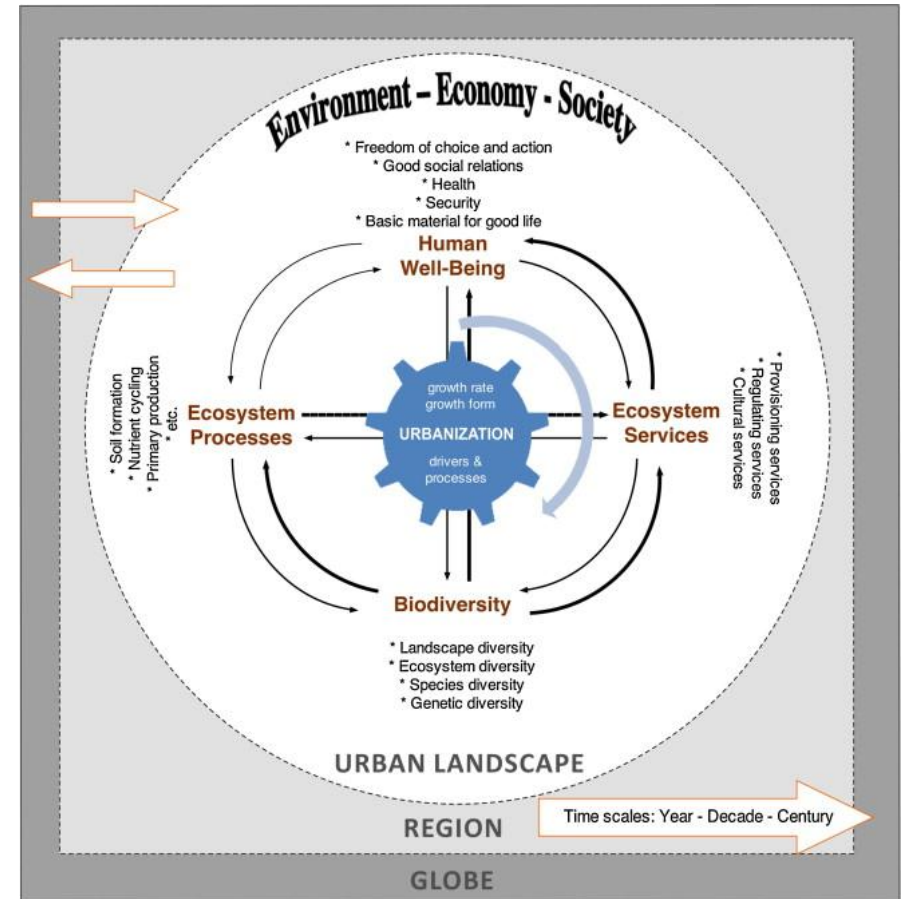


The Urban Ecosystem



# Proses Urbanisasi dan Ekosistem Perkotaan

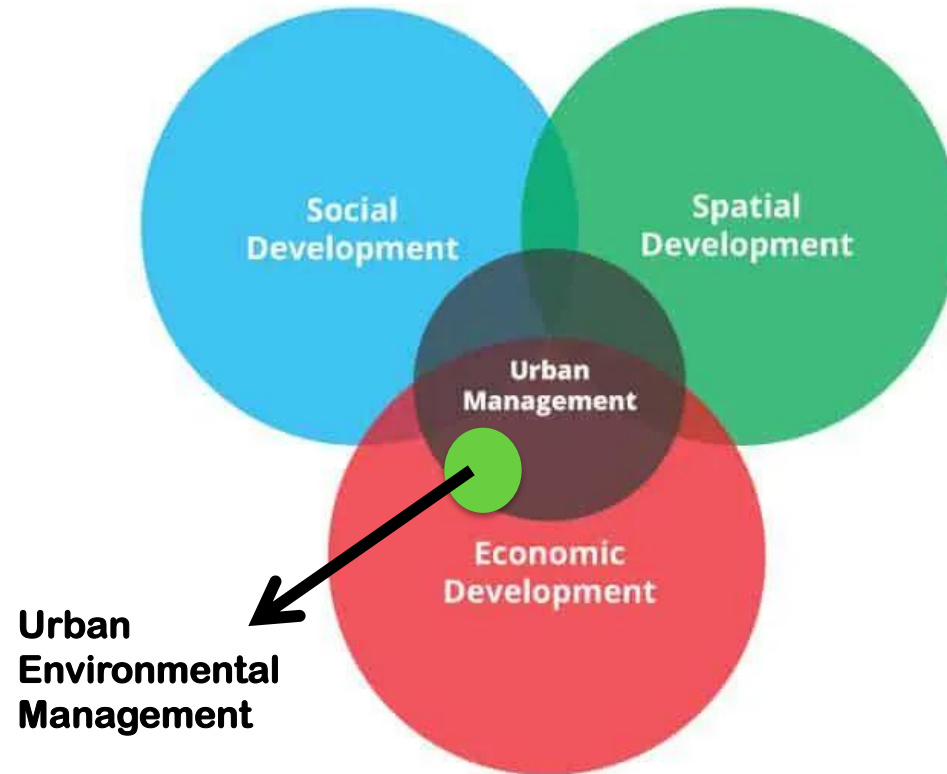
- ❑ Kawasan Perkotaan (urban landscape) sebagai ekosistem binaan mencakup lingkungan fisik alami, lingkungan ekonomi dan sosial budaya mengalami proses urbanisasi.
- ❑ Tampilan Urbanisasi dipengaruhi oleh faktor penggerak (driver), proses, tingkat pertumbuhan dan bentuk pertumbuhan;
- ❑ Ada hubungan antara proses Urbanisasi dengan perubahan ekosistem fisik, keanekaragaman hayati, jasa ekosistem dan kesejahteraan masyarakat perkotaan.
- ❑ Jasa lingkungan meliputi: a) jasa pengaturan, jasa penyediaan, budaya dan pendukung.
- ❑ Kawasan Perkotaan memiliki hubungan fungsional dengan wilayah sekitarnya pada lanskap regional, nasional dan global.



**Manajemen Perkotaan**



# Batasan Manajemen Perkotaan



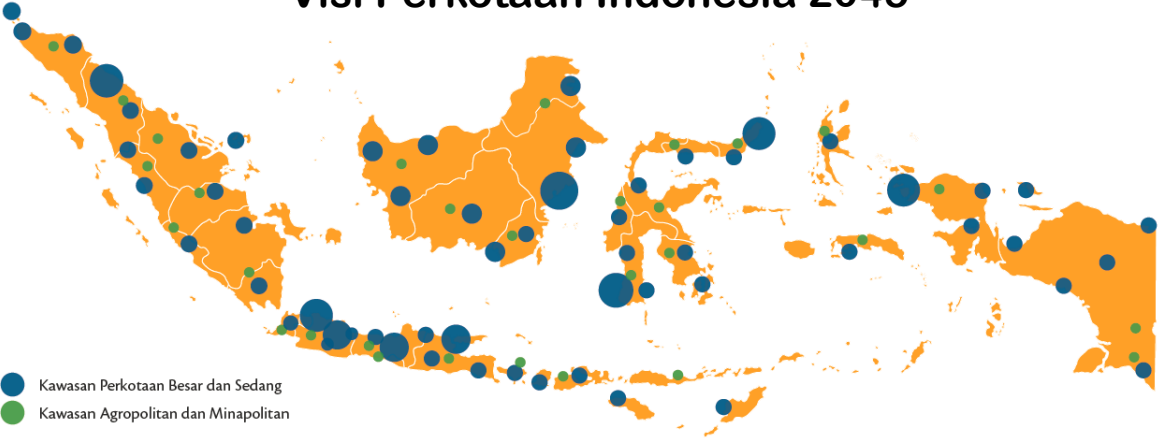
- ❑ **Manajemen perkotaan** adalah pengelolaan sumber daya perkotaan yang berkaitan dengan bidang-bidang tata ruang, lahan, ekonomi, keuangan, lingkungan hidup, pelayanan jasa, investasi, prasarana dan sarana perkotaan; oleh pemerintah bersama pemangku kepentingan perkotaan.
- ❑ **Pengelolaan Lingkungan Hidup Perkotaan** adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup perkotaan dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan melalui rangkaian kegiatan perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. (adaptasi UU 32 thn 2009 ttg PPLH)

# **Skema Pengembangan Perkotaan Di dalam Dokumen Perencanaan Nasional**

# Skema Dokumen Pengembangan Perkotaan



## Visi Perkotaan Indonesia 2045



Bappenas, 2019

RPJMD & RTRW  
Kab/Kota

Renstra  
Kabupaten &  
Kota



BPIW PUPR, 2018



Bappenas

# Integrasi Manajemen Lingkungan Perkotaan Ke dalam Kerangka Kerja Pengembangan Perkotaan.

## Integrasi Instrumen Pembangunan

- 1) Integrasi rencana sektor-sektor dengan rencana tata ruang kabupaten/kota sesuai daya dukung lingkungan kota/perkotaan.
- 2) Konsistensi rencana struktur ruang dengan permukiman penduduk;
- 3) Konsistensi rencana struktur ruang dengan infrastruktur kota/perkotaan;
- 4) Pengadaan tanah/ lahan yang efisien
- 5) Skenario target transformasi ekonomi kota
- 6) Pemberdayaan masyarakat
- 7) Tata kelola pemerintahan yg efektif
- 8) Manajemen Anggaran pengelolaan

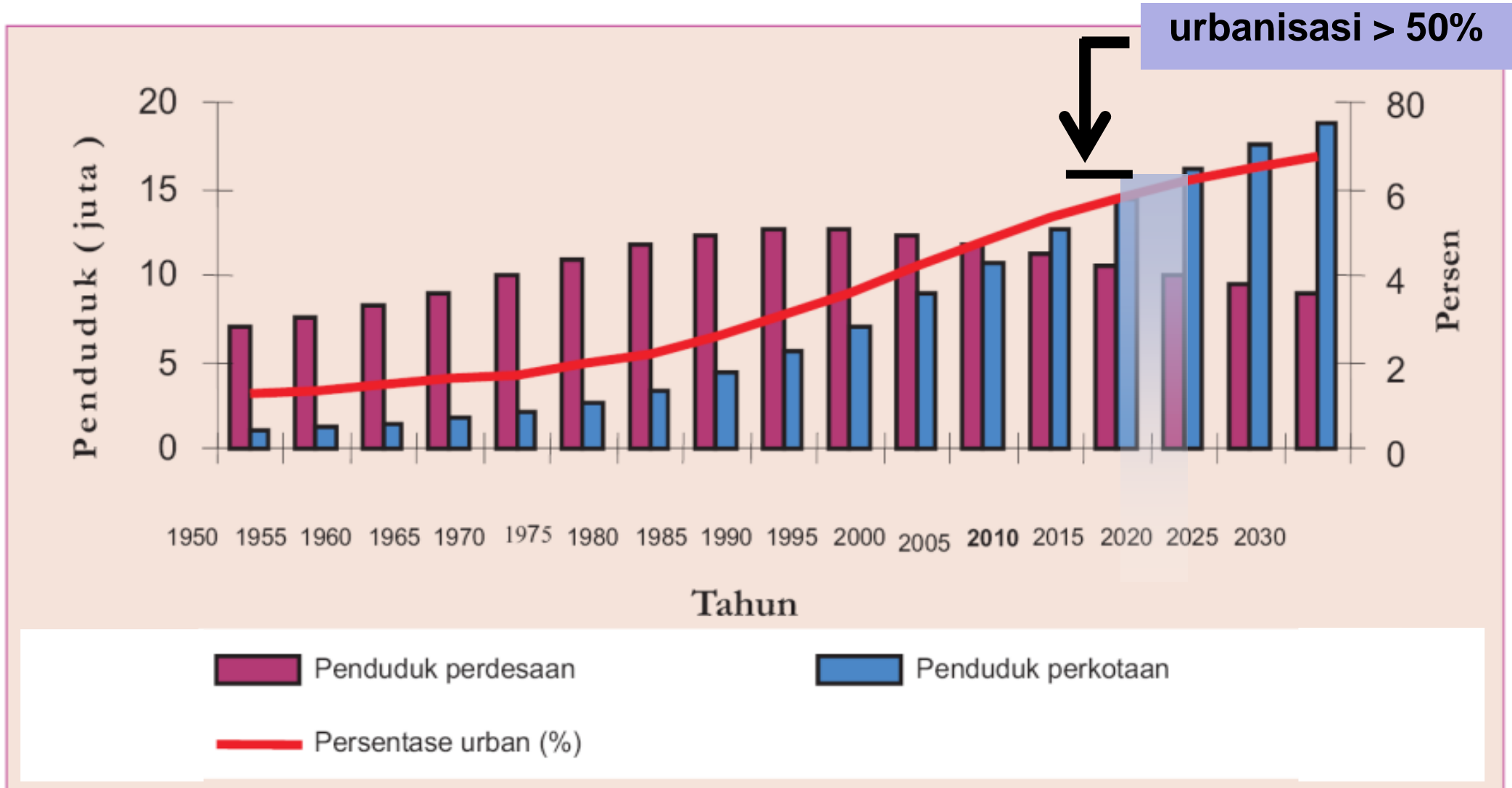


## Sasaran

- 1) Semua pemangku kepentingan ikut serta
- 2) Pertumbuhan yang inklusif
- 3) Tata Kelola Pemerintahan yang efektif
- 4) Tata ruang terpadu

# **Review perkembangan kota/perkotaan di Indonesia dan Skema Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang**

# Dinamika Perubahan Penduduk Perdesaan dan Perkotaan Indonesia



Sumber: Robert and Kanaley (eds) 2006, diambil dari World Population Prospect 2002 Revision dan 2003 Revision

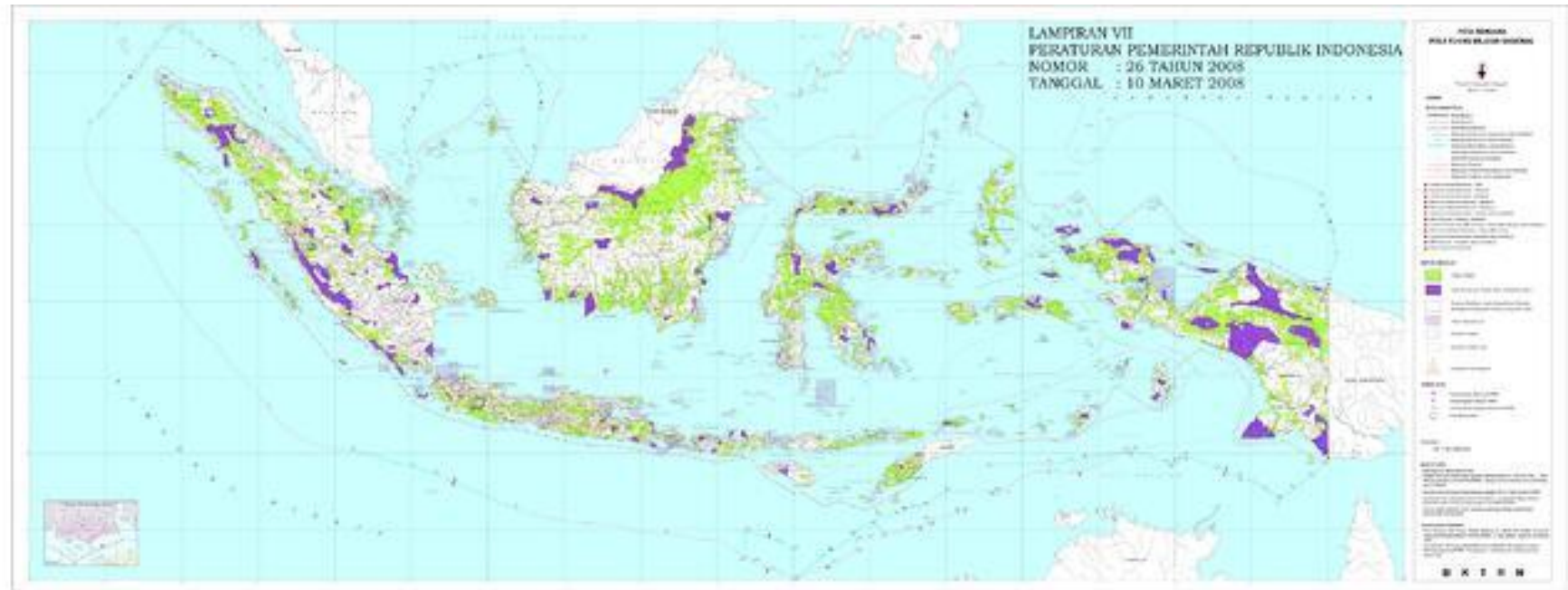




## Rencana Struktur Ruang Nasional:

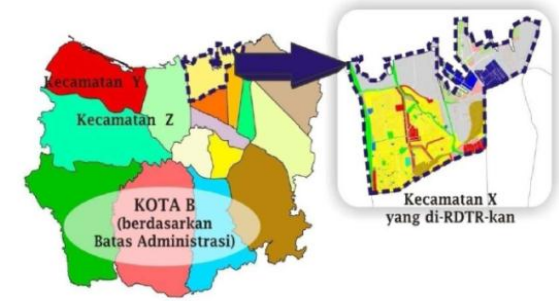
- 1) Kawasan Perkotaan Metropolitan : 10
- 2) Kota Otonom : 98
- 3) Kawasan Perkotaan KP Pusat Pemerintahan Kab: 416
- 4) Kaw. Perkotaan Kecil di Kecamatan 7094 KP

## Rencana Pola Ruang Nasional

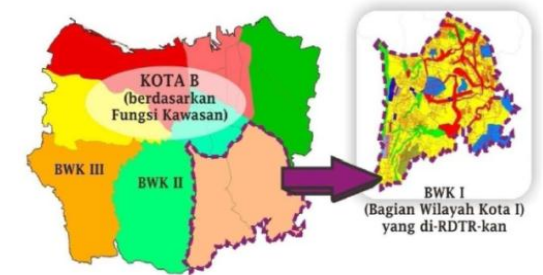


# Tipologi Kawasan Perkotaan di Kabupaten

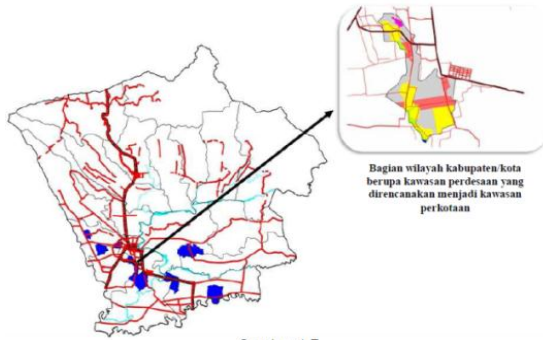
**Kawasan perkotaan : wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.**



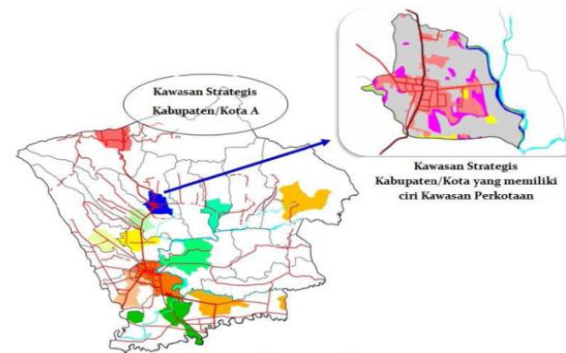
1 Wilayah Kecamatan



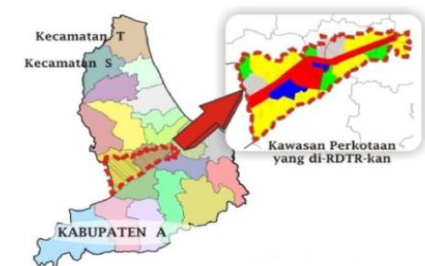
2 Bagian Fungsional Kota



5. Perdesaan yang Dipromosi



4. Kaw Strat Kabupaten



3 BW Kabupaten

## **Generalisasi Permasalahan Lingkungan Perkotaan**

- 1) Perubahan Jumlah penduduk dan komuter tdk terkendali.**
- 2) Jaringan jalan & angkutan umum tidak memadai.**
- 3) Jaringan drainasi dan sanitasi tidak memadai.**
- 4) Jaringan dan pasokan air bersih tidak memadai.**
- 5) Penambangan air tanah berlebihan dan tidak terkendali.**
- 6) Urban Land Subsidence (kota pesisir pantai)**
- 7) Kemiskinan struktural masyarakat kota.**
- 8) Urban slum dan urban squatter**
- 9) Banjir dan genangan air**
- 10) Sarana sosial tidak memadai**
- 11) Penanganan sampah tidak memadai**
- 12) Pencemaran Lingkungan (Air, tanah dan udara)**
- 13) Kualitas Kesehatan Masyarakat rendah**
- 14) Pencemaran perairan laut**
- 15) Sengketa lingkungan hidup.**

# Kajian Kualitas Lingkungan Hidup Perkotaan



- ❖ Tahun 2019, 55,8% penduduk Indonesia tinggal di perkotaan; **Tahun 2035 diperkirakan mencapai 67%**.
- ❖ Kawasan perkotaan merupakan pusat pertumbuhan ekonomi, kontribusinya sekitar 80% dari PDB Nasional.
- ❖ Kawasan perkotaan mengkonsumsi sekitar 70 persen dari konsumsi energi nasional, **menggunakan lebih dari 70 persen sumber daya serta menghasilkan 70 persen dari emisi karbon nasional**.
- ❖ Permasalahan lingkungan hidup perkotaan yang terbesar adalah ketersediaan dan kualitas sumber **daya air, terutama di Pulau Jawa** yang didiami lebih dari separuh penduduk Indonesia dan sebagian besar tinggal diperkotaan; ketersediaan airnya hanya 4,2 persen total ketersediaan air Indonesia: Seluruh DAS di pulau Jawa kondisi kritis.



lanjutan.....

- ❖ Tahun 2017, emisi GRK dari sektor energi sebesar 48,6 persen, emisi dari sektor limbah sekitar 10,4 persen dan dari industri adalah 4,8 persen.
- ❖ Dampak perubahan iklim menimbulkan bencana; sepanjang 2018 - 2019, tercatat lebih dari 1.800 kejadian puting beliung, 1.400 kejadian banjir dan lebih dari 1.100 tanah longsor yang menelan korban 650 jiwa.
- ❖ **Lingkungan dengan kualitas buruk menurunkan kualitas kesehatan masyarakat.** Selama 2018 terjadi 10 kali KLB diare di 8 provinsi dengan 756 penderita dan 36 kematian. Insiden pneumonia pada balita sebesar 20,06 per 1000 balita.
- ❖ **Tantangan yang muncul adalah penyediaan jasa lingkungan dasar untuk melindungi kesehatan masyarakatnya.**
- ❖ Pada tahun 2018, rumah tangga perkotaan yang tidak memiliki akses air minum layak sebanyak 18,45%, 19,5% akses sanitasi tidak layak.
- ❖ Untuk upaya pengurangan sampah, sekitar 32% rumah tangga perkotaan membuang sampah ke TPS; ada kota yg belum mengangkut sampahnya.
- ❖ Untuk pengolahan limbah cair domestik, sampai tahun 2018 terbangun 96 unit Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Terpusat.

# Kota Layak Huni di Indonesia (IAP 2019)

## Indikator Penilaian Kota Layak Huni:

- 1) Ketersediaan kebutuhan dasar; perumahan yang layak, air bersih, jaringan listrik, sanitasi, ketercukupan pangan.
- 2) Ketersediaan fasilitas umum dan sosial.
- 3) Keamanan dan keselamatan.
- 4) Ketersediaan ruang publik sebagai wadah untuk berinteraksi antar komunitas.
- 5) Kualitas lingkungan.
- 6) Partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
- 7) Dukungan fungsi ekonomi, sosial, dan budaya kota

## Hasil Penilaian:

### Jenjang Atas

1. Solo (66,9)
2. Palembang (66,6)
3. Balikpapan (65,8)
4. Denpasar (65,5)
5. Semarang (65,4)
6. Tangerang Selatan (65,4)
7. Banjarmasin (65,1)

### Jenjang Menengah

1. Pekalongan (64,7)
2. Bandung (63,6)
3. Yogyakarta (63,6)
4. Malang (63,5)
5. Surabaya (63,2)
6. Bogor (63,2)
7. Palangkaraya (62,9)
8. Jakarta (62,6)
9. Manado (62,5)

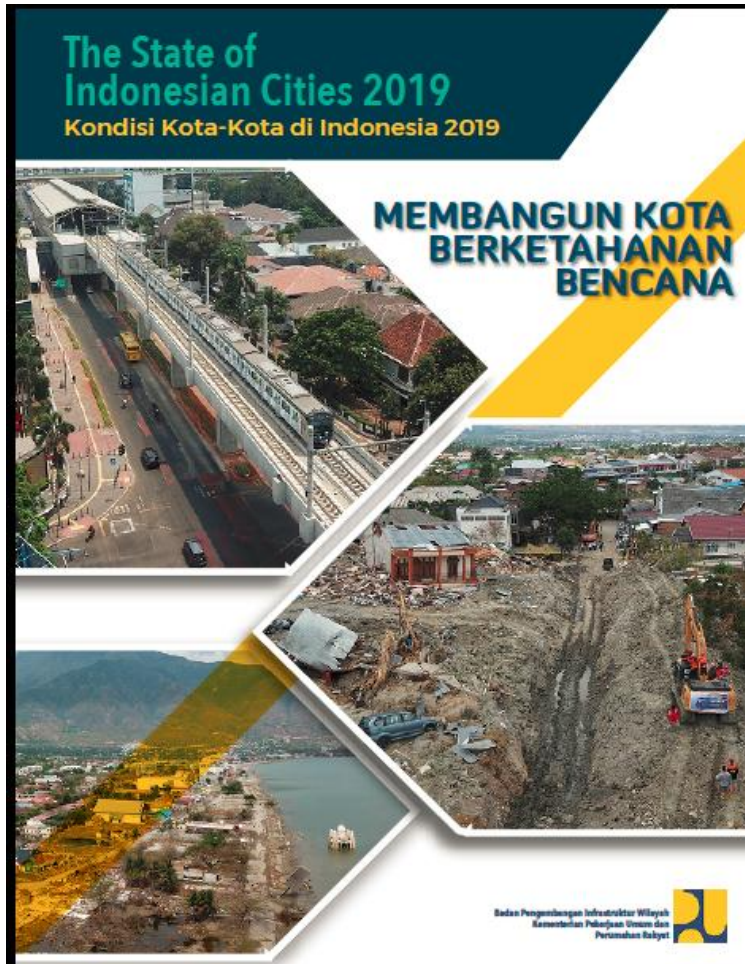
### Jenjang Bawah

1. Pontianak (62)
2. Depok (61,8)
3. Mataram (61,6)
4. Tangerang (61,1)
5. Banda Aceh (60,9)
6. Pekanbaru (57,8)
7. Samarinda (56,9)
8. Bandar Lampung (56,4)
9. Medan (56,1)
10. Makassar (55,7)



# The State of Indonesian Cities (2019)

(Pusat Perkotaan, BPIW, Kementerian PUPR, 2019)



- 1) Kondisi kota-kota di Indonesia yang rentan terhadap bencana alam serta dampak dari perubahan iklim membutuhkan pembangunan dan pengelolaan perkotaan yang berwawasan lingkungan dan berketahanan;
- 2) Menyadari bahwa kota-kota di Indonesia banyak yang berkembang di daerah rawan bencana; menjadi kewajiban untuk menyediakan infrastruktur yang tangguh dengan memperhatikan kondisi sekitar;
- 3) Masih banyak kota di Indonesia yang belum sepenuhnya menyadari tantangan dan risiko kebencanaan dan ancaman perubahan iklim.
- 4) ***Sudah saatnya tiap pemangku kepentingan, pemerintah, sektor bisnis, akademisi, lembaga masyarakat, dan komunitas, bergerak bersama-sama mewujudkan kota masing-masing sebagai tempat yang layak untuk dihuni dan hidup harmonis dengan bencana.***

**Urusan Pemerintahan Di Bidang  
Lingkungan Hidup Menurut UU no 23  
thn 2014 ttg Pemerintahan Daerah dan  
Instrumen PPLH Perkotaan Menurut  
UU 32 thn 2009**



**Urusan Lingkungan Hidup  
urusan pemerintahan konkuren wajib,  
non pelayanan dasar**

# Urusan Pemerintahan Konkuren Kewenangan Daerah ( Pasal 11)



Lingkungan Hidup tergolong urusan pemerintahan konkuren wajib non pelayanan dasar.



Lingkup PPLH menurut UU 32 thn 2009

# UU 32/2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan LH



# **Pembangunan Perkotaan Di Dalam RPJPN 2005-2025**



# Masalah Perkotaan Yang Dihadapi (RPJPN 2025)

- 1 Pertumbuhan kota-kota besar dan metropolitan sangat terpusat di pulau Jawa-Bali,
- 2 Pertumbuhan perkotaan yang tidak seimbang ini ditambah dengan adanya kesenjangan pembangunan antarwilayah menimbulkan urbanisasi yang tidak terkendali.
- 3 Meluasnya wilayah perkotaan karena pesatnya perkembangan dan meluasnya kawasan pinggiran (*fringe-area*) terutama di kota-kota besar dan metropolitan;
- 4 Meluasnya perkembangan fisik perkotaan di kawasan 'sub-urban' yang telah 'mengintegrasikan' kota-kota yang lebih kecil di sekitar kota inti dan membentuk konurbasi yang tak terkendali;
- 5 Meningkatnya jumlah desa-kota;
- 6 Terjadinya reklasifikasi (perubahan daerah rural menjadi daerah urban, terutama di Jawa).



# Strategi Pengembangan Kota Berkelanjutan

- 1) **Penerapan manajemen perkotaan** yang meliputi optimasi dan pengendalian pemanfaatan ruang serta pengamanan zona penyangga di sekitar kota inti dengan penegakan hukum yang tegas;
- 2) Peningkatan peran dan fungsi kota-kota menengah dan kecil di sekitar kota inti agar kota-kota tersebut tidak hanya **berfungsi sebagai kota tempat tinggal**, tetapi juga menjadi kota mandiri;
- 3) Pengembangan kegiatan ekonomi kota yang ramah lingkungan seperti industri jasa keuangan, perbankan, asuransi, dan industri telematika serta peningkatan kemampuan keuangan daerah perkotaan;
- 4) *Percepatan pembangunan kota-kota kecil* dan menengah terutama *di luar Pulau Jawa*;
- 5) **Prioritas pembangunan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan dasar sesuai dengan tipologi masing-masing kota** (memenuhi Standar Pelayanan Perkotaan);

## Visi Pembangunan 2005-2025 INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR

Sasaran Pokok Pembangunan Jangka Panjang Nasional diupayakan secara bertahap melalui RPJMN lima tahunan sebagai berikut:

I RPJMN 2005 - 2009



Menata kembali dan membangun Indonesia di segala bidang yang ditujukan untuk menciptakan Indonesia yang aman dan damai, yang adil dan demokratis dan yang tingkat kesejahteraan rakyatnya meningkat

II RPJMN 2010 - 2014



Memantapkan penataan kembali Indonesia di segala bidang dengan menekankan upaya peningkatan kualitas SDM termasuk pengembangan kemampuan ilmu dan teknologi serta penguatan daya saing perekonomian

III RPJMN 2015 - 2019



Memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan IPTEK yang terus meningkat

IV RPJMN 2020 - 2024



Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya **struktur perekonomian yang kokoh** berlandaskan **keunggulan kompetitif di berbagai wilayah** yang didukung oleh **SDM berkualitas** dan berdaya saing

### TIGA KATA KUNCI:

- Struktur Perekonomian yang Kokoh
- Keunggulan Kompetitif Wilayah
- SDM Berkualitas

# KERANGKA PEMBANGUNAN PERKOTAAN NASIONAL (DRAFT RPJMN 2015-2019)

## VISI: KOTA BERKELANJUTAN TAHUN 2045

Standar Pelayanan Perkotaan (SPP)

Kota Berkelanjutan: Kota Layak Huni, Kota Hijau, dan Kota Cerdas Ynag Berdaya Saing

Standar Pelayanan Perkotaan (SPP)

Tata Kelola Pembangunan Perkotaan

- Pilar 1:** Kota yang aman, nyaman dan layak huni
- Pilar 2:** Kota Hijau yang Berketahanan Iklim dan Bencana
- Pilar 3:** Kota Pintar dan Berdaya Saing Berbasis Teknologi dan IT
- Pilar 4:** Membangun Identitas Perkotaan

- Indonesia Berbasis Karakter Fisik, Keunggulan Ekonomi dan Budaya Lokal
- Pilar 5:** Membangun Keterkaitan dan Manfaat Antarkota dan Desa-Kota dalam Sistem Perkotaan Nasional Berbasis Kewilayahan

### Komponen 1

Bantuan Teknis Pemerintah Daerah

### Komponen 2

Penyusunan Regulasi, Kelembagaan dan Pembiayaan

### Komponen 3

Pembangunan Infrastruktur Perkotaan

### Komponen 4

Manajemen Program

- Green Cities (ADB): Batam, Kendari, Malang, dan Medan
- Urban Resilience (WB): Padang Panjang, Pare-Pare, Balikpapan, dan Surabaya
- Urban Nexus (GIZ): Yogyakarta, Surakarta, Tanjung Pinang, dan Pekanbaru
- PDF (CDIA & WB): Skala Nasional
- KSPPD (WB): TBD
- Urban Green Growth (OECD): Surabaya
- Urban Sustainable (KOICA): Skala Nasional
- Smart Cities (GIZ): TBD
- City Local Economic Development: CIDA
- City Facilitation (CDIA): Semarang, Probolinggo, dan Palu
- Sister City (CDIA & Kemendagri): Surakarta

**KSPPN:  
KEBIJAKAN**

**NUDP:  
PROGRAM**

**PILOT PROJECT**

**IKB: INSTRUMEN  
MONEV** <sup>10</sup>

Sosial budaya

Ekonomi

Lingkungan

Kelembagaan dan Pembiayaan

Pelayanan Perkotaan

Sistem Perkotaan

# Isu Strategis Kewilayahan RPJMN 2020-2024

Kementerian PPN/  
Bappenas



## PENURUNAN KETIMPANGAN ANTAR WILAYAH

- Kemiskinan di KTI (12,3%), KBI (8,5%), perdesaan (13,1%) dan perkotaan (7,02%) yang tinggi (BPS, 2018)
- Ketimpangan Pendapatan Perdesaan (0,324) -Perkotaan (0,4)
- Konsentrasi kegiatan ekonomi di KBI terutama Pulau Jawa

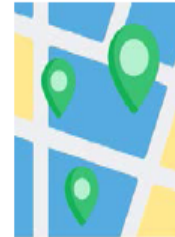


## PENGELOLAAN URBANISASI

- Penduduk perkotaan yang akan mencapai 60% dan bonus demografi 2030
- Kontribusi urbanisasi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional yang rendah (1% urbanisasi menghasilkan hanya 4% PDB, di India 13% PDB)

## PENGUATAN PUSAT PERTUMBUHAN WILAYAH

- Tingkat keberhasilan Pusat Pertumbuhan Baru yang rendah (10 dari 12 KEK, 4 dari 14 KI, 2 dari 4 KPBPB, dan 10 Destinasi Wisata)
- Konektivitas dari dan menuju Pusat-Pusat Pertumbuhan yang lemah
- Kawasan Strategis Kabupaten yang belum berkembang



## PEMANFAATAN RUANG

- Konflik ruang yang semakin meningkat (15.525 kasus periode 2015-2018)
- Desa-desa dalam kawasan hutan dan perkebunan besar tidak dapat melaksanakan kewenangannya terutama untuk pembangunan infrastruktur (20.000 desa)
- Kejadian Bencana akibat pemanfaatan ruang yang belum sesuai semakin meningkat (sekitar 2.000 kasus kejadian Banjir, Longsor, Kebakaran Hutan, dsb)

## PEMENUHAN PELAYANAN DASAR DAN PENINGKATAN DAYA SAING DAERAH

- Akses dan kualitas pelayanan dasar yang terbatas (perumahan layak baru 37,8%, air minum 72%, sanitasi layak 67,5%, dsb) (BPS, 2017)
- Ketergantungan APBD terhadap Dana Transfer yang tinggi (rata-rata >70% APBD Kab/Kota dan >50% APBD Provinsi dari Pusat) serta sumber Pendanaan Non APBN yang kurang optimal
- Peraturan Perundangan yang belum harmonis serta Kerjasama dan Inovasi Daerah yang belum berkembang
- Proses perizinan yang lama dan berbiaya tinggi (118 Hari → Papua)



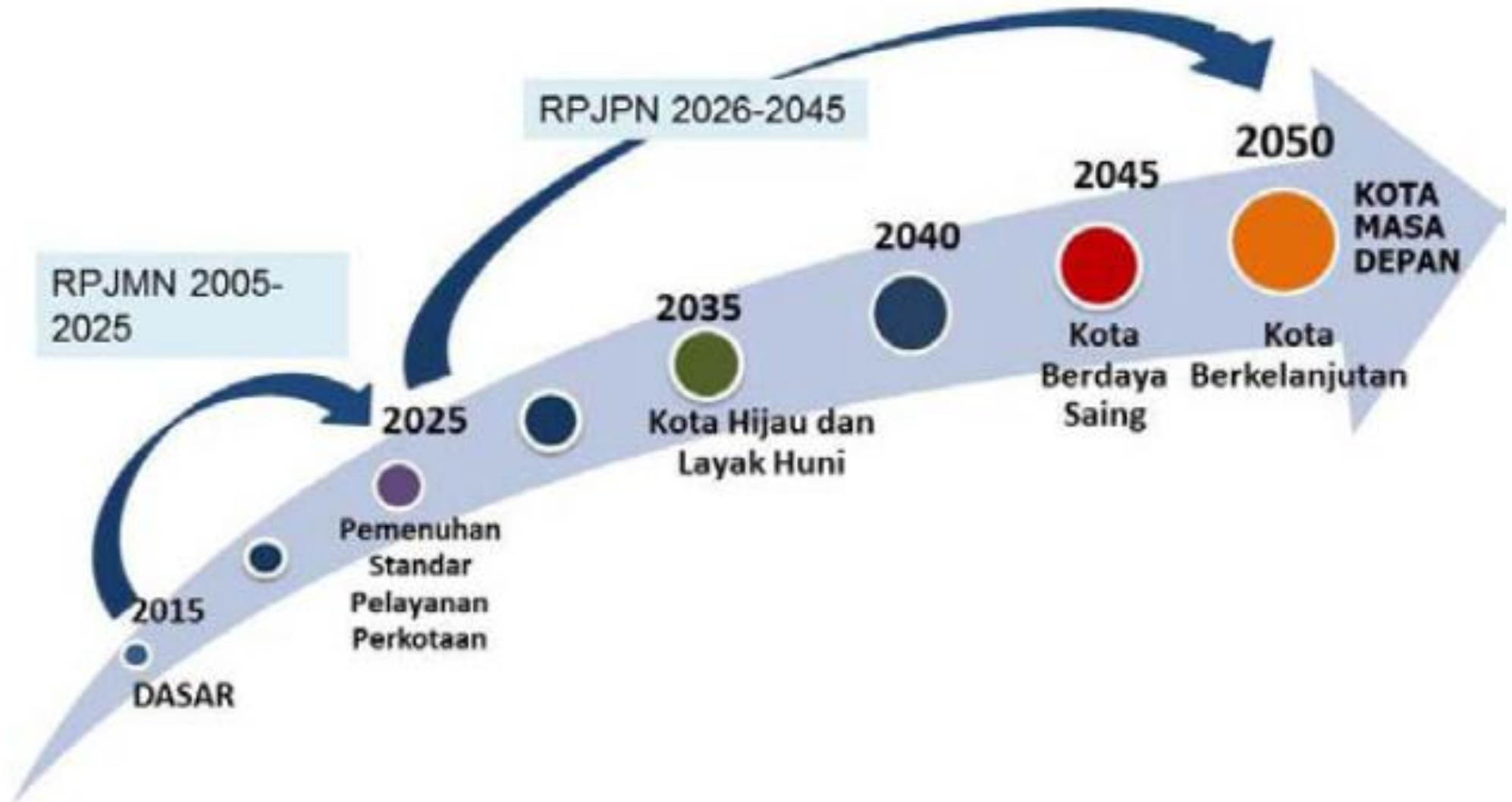
**VISI DAN MISI DI DALAM DOKUMEN  
KEBIJAKAN DAN STRATEGI  
PEMBANGUNAN PERKOTAAN NASIONAL  
(KSPPN) 2050, Bappenas, 2015**







# Tahapan Pencapaian Perwujudan Pelayanan Perkotaan Nasional



# Menuju Kota Berkelanjutan

RPJPN 2005-2025

RPJPN 2025-2045

Pemenuhan Standar Pelayanan Perkotaan (SPP) menuju KOTA LAYAK HUNI

KOTA BERKELANJUTAN

100 % Indikator KOTA HIJAU terwujud di seluruh kota

100 % Indikator KOTA HIJAU yang berdaya saing dan berbasis teknologi terwujud di seluruh kota

2015

2025

2035

2045

Path to the Future Cities

1

Pemenuhan Standar Pelayanan Perkotaan (SPP) dan indikator kota layak huni

2

Pemenuhan indikator kota hijau berketahanan iklim dan bencana

3

Pemenuhan indikator kota cerdas berdaya saing

# Beberapa Isu Strategis dan Tantangan Pembangunan Perkotaan Nasional

- (1) Tkt pertumbuhan pddk perkotaan 2,75% /thn , Tkt pertumbuhan pddk rata-rata nasional sebesar 1,17%/tahun; Tahun 2025 tkt Urbanisasi 68%  
Thn 2045 : 82 %
- (2) Sampai dengan tahun 2012, pertumbuhan kota rata-rata mencapai 19% per tahun; Kota-kota dengan jumlah penduduk 100.000-500.000 jiwa (kota sedang) merupakan kota dengan proporsi terbesar;
- (3) Proporsi terbesar penduduk perkotaan tinggal di kota-kota di Jawa dan Sumatera; Di luar Jawa kota-kota sedang domin;
- (4) Kota sedang dengan jumlah terbanyak (56%) memberikan kontribusi rendah dan semakin menurun dalam perekonomian nasional (6;55%), dibandingkan dengan metropolitan; yang kontribusinya semakin meningkat.
- (5) Tingkat kemiskinan tertinggi di kota-kota metropolitan, diikuti dengan kemiskinan di kota-kota sedang; masalah- masalah sosial semakin meningkat di kota-kota metropolitan, kota besar, dan menyusul di kota sedang;
- (6) Sarana dan Prasarana kota sangat minim**
- (7) Transportasi massal belum menjadi acuan pembangunan,
- (8) Aspek Daya Saing kota-kota Indonesia masih rendah walaupun sdh meningkat.



# Tahapan Pengembangan Perkotaan

**Pilar 1:**  
**Kota yang aman, nyaman dan layak huni**



- Lingkungan Kota
- Pendidikan
- Kesehatan
- Transportasi
- Sosial
- Budaya Hidup
- Keamanan

Visi Pembangunan Perkotaan Nasional

1. Kota aman, nyaman dan layak huni

**Pilar 2: Kota Hijau yang Berketahanan Iklim dan Bencana**



Kota yang dibangun dengan memanfaatkan secara efektif dan efisien sumber daya air, energi dan ruang kota yang memperhatikan dan menjamin kesehatan lingkungan kota serta menynergikan lingkungan alami dan lingkungan buatan kota untuk dapat mengembangkan ketahanan kota terhadap perubahan iklim, melalui:

- Penggunaan sumber daya terbarukan;
- Pemanfaatan infrastruktur hijau;
- Pemanfaatan ruang dan kegiatan perkotaan yang efisien dan berkeadilan;
- Pengelolaan lingkungan;
- Perlindungan lingkungan perkotaan;

KOTA 2045

2. Kota hijau berketahanan iklim

**Pilar 3: Kota Pintar dan Berdaya Saing Berbasis Teknologi dan IT**



Kota yang mampu menggunakan SDM, modal sosial, dan infrastruktur telekomunikasi modern (ICT) untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, keunggulan ekonomi yang kompetitif serta kualitas kehidupan yang tinggi dengan manajemen sumber daya yang bijaksana melalui:

- Pengembangan ekonomi yang produktif, kreatif, dan inovatif;
- Tata kelola pemerintahan kota dan pelayanan publik;
- Kota yang memiliki pelayanan prasarana sarana hunian, kesehatan, pendidikan dan keamanan;
- Pengelolaan sumber daya lingkungan kota; dan
- Pembangunan masyarakat cerdas yang inovatif, kreatif, dan produktif;

KOTA 2045

3. Kota pintar dan berdaya saing

**Pilar 4: Membangun Identitas Perkotaan Indonesia Berbasis Karakter Fisik, Keunggulan Ekonomi dan Budaya Lokal**



Memperkuat karakter perkotaan nasional dengan membangun ketahanan sosial-budaya yang memperhatikan keunggulan keanekaragaman hayati dan sosial budaya lokal, keunggulan geografis dan iklim tropis, serta memperhatikan bentuk kota dan bentuk fisik kota baik alami maupun buatan, melalui:

- Keunggulan ekonomi yang dimiliki suatu kota baik berasal dari faktor produksi maupun non faktor produksi, secara kompetitif sehingga mendorong daya saing suatu kota; dan;
- Kota yang mampu mengelola dan mengangkat budaya masyarakatnya sebagai pencitraan kota dan untuk kepentingan lainnya sehingga mampu memberikan identitas berbeda;

KOTA 2045

4. Membangun identitas perkotaan

**Pilar 5: Membangun Keterkaitan dan Manfaat Antarkota dan Desa-Kota dalam Sistem Perkotaan Nasional Berbasis Kewilayahan**



Mengurangi kesenjangan pembangunan, keterkaitan ekonomi antarkota dengan wilayah sekitarnya khususnya wilayah pedesaan, serta pembagian fungsi dan peran kota dalam sistem perkotaan nasional yang efisien, melalui:

- Hubungan timbal balik antar kota baik logistik, sumber daya, maupun tenaga kerja, dalam sistem perkotaan nasional yang dihubungkan melalui prasarana sarana;
- Hubungan timbal balik antara kota dan desa baik logistik, sumber daya maupun tenaga kerja dalam sistem keterkaitan kota dengan wilayah pedesaan yang terintegrasi;
- Hierarki fungsi dan peran kota dalam sistem pelayanan perkotaan nasional yang efisien dalam bentuk pusat-pusat kegiatan yang berbasis pada wilayah kepulauan;

KOTA 2045

5. Membangun keterkaitan antar kota



Kota Berkelanjutan

# **Agenda Baru Perkotaan**

# Program Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 11 Tahun 2030.

- 1) Jumlah Rumah Tinggal Hunian Layak dan Terjangkau
- 2) Penyediaan layanan angkutan umum dalam trayek /sarpras angkutan perkeretaapian
- 3) Pengembangan Kawasan Strategis
- 4) Pemenuhan kebutuhan sarpras Kawasan Strategis
- 5) Menurunnya Indeks Risiko Bencana (IRB)
- 6) Meningkatnya cakupan penanganan sampah perkotaan dan Sanitasi.
- 7) Ruang Terbuka Hijau (RTH)
- 8) Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana
- 9) Program Pengelolaan Kedaruratan & Logistik Bencana
- 10) Program Rehabilitasi & Rekonstruksi Pasca Bencana.





# Integrasi SDGs dan NUA di Indonesia

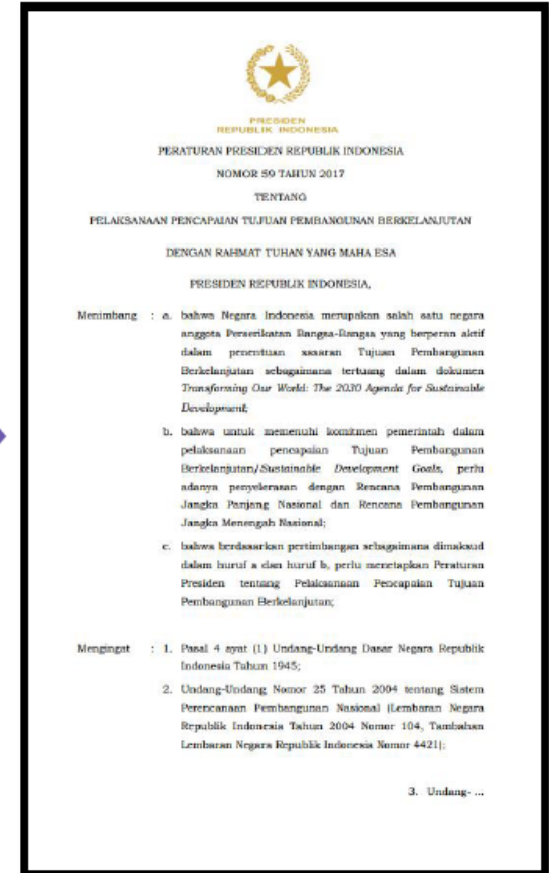
## SDGs:

Universal;  
Integration;  
No One Left  
Behind



## NUA:

Equality – Leave No  
One Behind:  
Sustainable and  
Inclusive;  
Environmental  
Sustainability



Perpres no 59 thn 2017 ttg Pelaksanaan Pencapaian  
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan-

## **Transformasi Kota Layak Huni Menuju Kota Berkelanjutan**

- 1) RPJPN 2005 sudah mengarahkan agar tahun 2015 - 2025 seluruh kota dan kawasan perkotaan secara bertahap memenuhi standar pelayanan perkotaan, mengacu ke Permendagri no 57 tahun 2010 ttg Pedoman Standar Pelayanan Perkotaan.**
- 2) Untuk itu, pengelola Kota Inti dan Kawasan Perkotaan Sekitarnya perlu melakukan transformasi bagian wilayah kota berbasis komunitas masyarakat.**
- 3) IKLH Perkotaan akan terpenuhi sejalan dengan pemenuhan standar pelayanan perkotaan;**
- 4) Pemerintah Pusat perlu melakukan penyempurnaan Peraturan Pemerintah nomor 34 tahun 2009 ttg Pengelolaan Kawasan Perkotaan.**
- 5) Prinsip pengelolaan lingkungan perkotaan harus diintegrasikan ke dalam peraturan pengelolaan kawasan perkotaan.**
- 6) Semoga kontribusi akademisi Prodi KPP SKSG UI makin nyata bagi tiap pemangku kepentingan, pemerintah, sektor bisnis, lembaga masyarakat, dan komunitas, bergerak bersama-sama mewujudkan kota masing-masing sebagai tempat yang layak dihuni, tangguh bencana. Kota pintar dan hijau sebagai kota berkelanjutan.**

# Terimakasih

•

